

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF
TENTANG KONSEP PERPAJAKAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANDAILING NATAL**



*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Maulana Muklis
NIM. 22080034**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF
TENTANG KONSEP PERPAJAKAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Maulana Muklis
NIM. 22080034**

Pembimbing I

Nurintan Siregar, M.E
NIP.198610212019032008

Pembimbing II

Jureid, M.E.I
NIP.198806242019031010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

Lembar Persetujuan Pembimbing

Pembimbing skripsi atas nama saudara Maulana Muklis, nim: 22080034 dengan judul skripsi **“Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Tentang Konsep Perpajakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan di atas telah memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal,

2026

Pembimbing I



Nurintan Siregar, M.E
NIP.198610212019032008

Pembimbing II



Jureid, M.E.I
NIP.198806242019031010

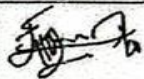
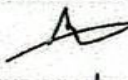
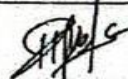
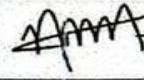
STAIN MADINA



LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul: "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Tentang Konsep Perpajakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal". Atas Nama Maulana Muklis, NIM. 22080034 Program Studi Ekonomi Syariah Telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Edi Marjan, M.E NIP. 198408072019031006	Penguji I		07/10/2026
2	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Penguji II		05/10/2026
3	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji III		05/10/2026
4	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Penguji IV		05/10/2026

Mandailing Natal, Oktober 2026
Mengetahui,
Ketua Stan Mandailing Natal

Dr. Muta Bahjat Lubis, M.Ed
NIP. 197303012003121004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Muklis
NIM : 22080034
Tempat/Tgl. Lahir : Aek Galoga, 19 Juni 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Aek Galoga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan
Panyabungan Kota, Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Tentang Konsep Perpajakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal”** adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian skripsi ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mandailing Natal, 19 09 2026

Yang membuat pernyataan



Maulana Muklis
NIM : 22080034

MOTTO

“Jadikanlah Sabar Dan Salat Sebagai Penolongmu. Sesungguhnya Allah Beserta Orang-Orang Yang Sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Pahami isi hati dan pikiranmu sendiri sebelum menilai orang lain”

(Socrates)

“Dengan percaya diri, Anda telah menang sebelum memulai”

(Marcus Garvey)

“Tak perlu mencari panggung. Masing-masing dari kita adalah panggung itu sendiri, tempat di mana versi terbaik diri kita tampil dengan cara masing-masing”

(Zul Fahmi)

“Tulisanmu akan membuat namamu selalu hidup, sekalipun jasadmu telah mati”

(Maulana Muklis)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemampuan wajib pajak, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab *al-Kharaj* memberikan perhatian terhadap hubungan antara perpajakan, pengelolaan keuangan negara, dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perpajakan menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf serta mengkaji relevansinya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer penelitian bersumber dari Kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, analisis isi, dan analisis relevansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perpajakan Abu Yusuf berlandaskan pada enam prinsip utama, yaitu keadilan dalam pemungutan pajak, kemampuan wajib pajak, sistem pajak proporsional (*muqasamah*), perlindungan produktivitas masyarakat, pengelolaan dan pengawasan pajak secara amanah, serta penggunaan penerimaan untuk kemaslahatan masyarakat. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak semata-mata dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi sebagai instrumen keuangan publik yang harus dikelola secara adil dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan dinilai relevan secara konseptual dan normatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, terutama dalam hal keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah, pemerataan manfaat pembangunan, dan penggunaan penerimaan publik untuk kepentingan masyarakat. Namun, relevansi tersebut tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat secara statistik karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

Kata kunci: Abu Yusuf, perpajakan, *Kitab al-Kharaj*, kesejahteraan masyarakat, ekonomi Islam.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of tax policies that are not only oriented toward increasing government revenue but also take into account fairness, taxpayers' ability to pay, economic productivity, and public welfare. Abu Yusuf's ideas in Kitab al-Kharaj focus on the relationship between taxation, public financial management, and the public good. This study aims to analyze the concept of taxation according to Abu Yusuf's economic thought and to examine its relevance to the welfare of the people of Mandailing Natal Regency. This study employs a literature review (library research) using a descriptive-analytical approach. Primary data for the study are sourced from Abu Yusuf's Kitab al-Kharaj, while secondary data were obtained from books, scientific journals, theses, and relevant documents. Data analysis was conducted through data reduction, data classification, content analysis, and relevance analysis. The research findings indicate that Abu Yusuf's concept of taxation is based on six main principles: fairness in tax collection, taxpayers' ability to pay, a proportional tax system (muqasamah), protection of public productivity, the faithful management and oversight of taxes, and the use of tax revenue for the public good. This line of thought indicates that taxes are not merely viewed as a source of state revenue but as a public financial instrument that must be managed fairly and in a way that does not hinder the community's economic activities. Furthermore, Abu Yusuf's ideas on taxation are considered conceptually and normatively relevant to the welfare of the people of Mandailing Natal Regency, particularly in terms of justice, the public good, government accountability, the equitable distribution of development benefits, and the use of public revenue for the benefit of the community. However, this relevance does not indicate a statistical cause-and-effect relationship, as this study is a literature review.

Keywords: Abu Yusuf, taxation, Kitab al-Kharaj, social welfare, Islamic economics.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas kepada umat manusia, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Tentang Konsep Perpajakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal.” Guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat berarti dalam proses ini :

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.
3. Ibu Rina Sari Lubis, M.PD selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.
4. Ibu Nurintan Siregar, M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini..
5. Bapak Jureid, M.E.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Seluruh civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.

7. Terkhushus dan teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua saya tercinta Ibunda Sri Muliani, Ayahanada Kusno yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang dan adik saya Saudari Qori Safitri yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sekali lagi kepada Ayah, Ibu, dan Saudari saya, Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya.
8. Terima kasih kepada teman saya saudara Zul Fahmi, S.H., Saudara Rahmad Hidayat Lubis, S.E., saudara Ridwanda Safikri, dan saudara Bayu Andika Satria Permadi yang selalu membantu peneliti memberikan kontribusi, dukungan, motivasi dan masukan-masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga persahabatan ini tidak hanya sampai disini dan kita dipertemukan nantinya dalam keadaan yang lebih baik sehat walafiat dan nantinya kita menjadi orang-orang yang sukses.
9. Terimakasih kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga akhir selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Mandailing Natal,

2026

**Maulana Muklis
NIM. 22080034**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syim	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

- a. Vokal tunggal adalah vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, berikut transliterasinya :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(—)	Kasroh	I	I
(—)	dhummah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasroh* dan *dhummah*, transliterasinya adalah /t/. Ta Marbutah mati yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- b. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :

Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Penjelasan Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Kajian Teori 10

1. Ekonomi Islam 10

2. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam 13

3. Konsep Perpajakan dalam Islam..... 14

4. Konsep Kesejahteraan dalam Islam 16

5. Konsep Relevansi 18

6. Konsep Perpajakan Abu Yusuf 20

7. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Tentang Kesejahteraan
Modren 23

B. Hasil Penelitian yang Relevan 24

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 28

B. Sumber Data Penelitian 28

C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Keabsahan Data	31
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal	34
2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal	35
B. Temuan Khusus	36
1. Biografi Abu Yusuf	36
2. Pemikiran Ekonomi Abu Yasuf	39
3. Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf	41
C. Pembahasan	49
1. Konsep Perpajakan Menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf	49
2. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Tentang Perpajakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Batas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal	36
Tabel 4.2. Jumlah Kecamatan dan Desa	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada pencapaian keuntungan material, ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual (Iswanto, 2022). Setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, serta menghindari segala bentuk praktik yang merugikan, seperti riba, gharar, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Dengan demikian, tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata (falah) melalui distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Siddiqi, 2001).

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi, melindungi hak-hak masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu (Ria, 2022). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban merumuskan berbagai kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Peran negara tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam (Putra et al., 2023).

Salah satu instrumen yang digunakan negara dalam menjalankan fungsi tersebut adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran

negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, pemerataan pembangunan, stabilisasi ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mubarok, 2021). Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal adalah perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Bulutoding, 2022). Dalam ekonomi Islam, pajak dipandang sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, proporsional, tidak memberatkan masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana penerimaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faozan et al., 2025).

Dalam kajian ekonomi Islam, konsep perpajakan telah mendapat perhatian dari para ulama klasik, salah satunya Abu Yusuf. Melalui karya monumentalnya *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan bahwa pajak bukan hanya instrumen untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Zunaidi, 2021). Menurutnya, pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemampuan wajib pajak, serta tidak dilakukan secara berlebihan agar tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penerimaan pajak harus dikelola secara amanah dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konsep perpajakan menurut Abu Yusuf menempatkan pajak sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara.

Kebijakan fiskal dan perpajakan telah menjadi perhatian para ulama sejak masa awal perkembangan pemerintahan Islam (Mubarak, 2021). Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan murid utama Imam Abu Hanifah sekaligus ulama yang dipercaya menjadi *Qadhi al-Qudhat* (hakim agung) pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Kedudukannya sebagai penasihat negara memberikan kesempatan kepadanya untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, administrasi perpajakan, pengelolaan tanah, dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pemikirannya kemudian dihimpun dalam karya monumentalnya yang berjudul *Kitab al-Kharaj*, yang hingga saat ini masih menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian ekonomi Islam (Amalia, 2010).

Pemikiran Abu Yusuf lahir dari kebutuhan praktis pemerintahan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan negara secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat. Menurut Abu Yusuf, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kekayaan negara secara amanah dan mendistribusikannya untuk kepentingan rakyat (Apriyanto, 2023). Pemerintah berkewajiban menciptakan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan usaha, menjaga stabilitas ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang masih relevan dengan berbagai persoalan ekonomi kontemporer.

Meskipun pemikiran Abu Yusuf berkembang lebih dari seribu tahun yang lalu, nilai-nilai yang dikemukakannya masih memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi ekonomi saat ini. Berbagai persoalan seperti ketimpangan pendapatan, tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya pengelolaan fiskal daerah, serta belum meratanya hasil pembangunan menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus tetap berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikemukakan Abu Yusuf mengenai keadilan fiskal, tanggung jawab

pemerintah, efisiensi administrasi perpajakan, dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi penting untuk dikaji kembali sebagai salah satu perspektif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Salah satu kontribusi terbesar Abu Yusuf dalam bidang ekonomi adalah konsep perpajakan yang dituangkan dalam *Kitab al-Kharaj*. Menurut Abu Yusuf, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi strategis dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan wajib pajak. Ia menolak praktik pemungutan pajak yang dilakukan secara berlebihan karena dapat mengurangi produktivitas masyarakat, menekan aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya justru menurunkan penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran pajak yang akan dipungut (Dewiantara & Sarmila, 2021).

Pemikiran inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji relevansi konsep perpajakan Abu Yusuf terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa sekarang, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep perpajakan Abu Yusuf menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan ekonomi daerah pada masa kini. Nilai-nilai keadilan, proporsionalitas, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pajak dapat dijadikan perspektif untuk menilai sejauh mana kebijakan perpajakan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Abu Yusuf mengenai perpajakan menjadi menarik untuk dikaji ketika dihubungkan dengan kondisi pembangunan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun pembangunan ekonomi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 masih mencapai 7,91% dengan garis kemiskinan sebesar Rp537.240 per kapita

per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga peningkatan kesejahteraan masih menjadi agenda penting pembangunan daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2025).

Selain tingkat kemiskinan, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Mandailing Natal juga masih memerlukan perhatian. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025 mencapai 74,26 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2025). Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi kemampuan fiskal daerah, kondisi Kabupaten Mandailing Natal juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah dibandingkan total pendapatan daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) tahun 2024, PAD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp134,54 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp130,38 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan pajak daerah hanya sekitar Rp35,77 miliar, sementara sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp1,54 triliun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2025).

Penelitian terdahulu sebagian besar hanya membahas konsep perpajakan Abu Yusuf dari aspek normatif atau sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sementara penelitian yang menghubungkan konsep perpajakan Abu Yusuf dengan kondisi fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal masih sangat terbatas. Padahal daerah ini memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif ekonomi Islam terhadap pengelolaan perpajakan daerah yang berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ekonomi Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adil, produktif, dan berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf tentang Konsep Perpajakan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal.”** Judul tersebut dipilih karena masih terbatasnya penelitian yang mengkaji relevansi konsep perpajakan Abu Yusuf terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memahami konsep perpajakan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam kajian terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya terhadap masyarakat Mandailing Natal. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perpajakan menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan terhadap kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis konsep perpajakan menurut pemikiran ekonomi Abu Yusuf.
2. Untuk mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Abu Yusuf tentang konsep perpajakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan ekonomi Islam dalam kajian pemikiran ekonomi klasik Islam mengenai konsep perpajakan. Melalui analisis pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dengan konteks sosial dan ekonomi kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah yang membahas hubungan antara kebijakan perpajakan dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Kabupaten Mandailing Natal dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan akademisi mengenai pentingnya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pemikiran ekonomi Islam serta penerapannya dalam konteks kebijakan publik daerah.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang ada dalam proposal skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut ini uraian beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Relevansi Konsep Ekonomi Islam

Relevansi konsep ekonomi Islam adalah tingkat kesesuaian dan menawarkan solusi atas ketimpangan sosial, krisis etika pasar, dan kebutuhan akan sistem keuangan yang berkeadilan. Relevansi ekonomi Islam di era modern terutama pada keadilan dan pemerataan, bebas dari spekulasi, keuangan yang inklusif, tanggung jawab sosial, dan orientasi keberlanjutan.

2. Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam merupakan konsep dan pandangan ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Pemikiran ini menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

3. Perpajakan dalam Perspektif Islam

Perpajakan dalam perspektif Islam adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk kepentingan umum dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep ini bertujuan untuk mendukung distribusi kekayaan yang adil serta pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.

4. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah serangkaian aturan dan keputusan pemerintah dalam menetapkan, memungut, dan mengelola pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial secara adil dan berkelanjutan. Kesejahteraan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai struktur pembahasan, diperlukan penjelasan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari tiga bab yang saling terkait satu sama lain. Sebagaimana sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan. |
| BAB II | Kajian Teori, berisikan teori-teori yang berkaitan dengan topik utama penelitian, yang meliputi konsep perpajakan dalam Islam, jenis-jenis pajak dalam Islam, pemikiran ekonomi Abu Yusuf tentang pajak, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam dan hubungan perpajakan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan pada bab ini. |
| BAB III | Metode Penelitian, berisikan pembahasan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. |
| BAB IV | Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini di bahas tentang Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Tentang Konsep Perpajakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Mandailing Natal. |
| BAB V | Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan tugas ahir, saran dan penutup. |